

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan
Memenuhi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S1)

Oleh

LASMAWATI
NPM: 2202120236



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
BANDA ACEH
2024**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI
JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Manajemen
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, Agustus 2024

TANDA PERSETUJUAN/PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

LASMAWATI
NPM: 2202120236

Dengan judul:

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

Yang diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.

Menyetujui / Mengesahkan :

Ketua Program Studi
Manajemen

Dr. Tuwisna, SE.,MM
NIK. 198507102015062001

Pembimbing I

H. Zulkifli Umar, SE,M.Si,Ak.CA
NIK. 197110192004051001

Pembimbing II

Svamsidar, SE,M.Si,Ak.CA
NIK. 197309211999012001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi,

Drs. Tarpiizi Gadeng, S.E.M.Si.,MM
NIK. 19700408 199401 1 001



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH

FAKULTAS EKONOMI

JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA

TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092

BANDA ACEH 23245

Jurusan : Manajemen
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, Agustus 2024

TANDA PERSETUJUAN KOMISI UJIAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

LASWAMATI
NPM : 2202120236

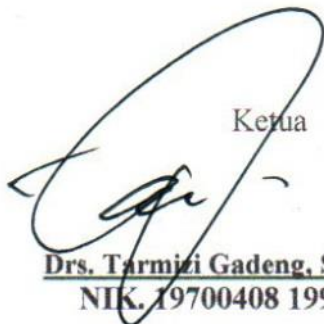
Dengan judul:

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

Yang telah dipertahankan di depan komisi ujian, pada tanggal 9 Juli 2024

Menyetujui / Mengesahkan :
Komisi Ujian

Ketua


Drs. Tarmizi Gadeng, S.E., M.Si., MM
NIK. 19700408 199401 1 001

Sekretaris


H. Zukifli Umar, S.E., M.Si., Ak. CA
NIK. 197110192004051001

Anggota


Svamsidar, S.E., M.Si., Ak. CA
NIK. 197309211999012001

Anggota


Rusnaldi, S.E., M.Si
NIK. 197906152005071001

Mengetahui
Ketua Program Studi Manajemen


Dr. Tuwisna, SE., MM
NIK. 19850710 201506 2 001

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“SAYA YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI INI TELAH DITULIS DENGAN SESUNGGUH-SUNGGUHNYA DAN TIDAK ADA BAGIAN YANG MERUPAKAN PENJIPLAKAN KARYA ORANG LAIN DI PROGRAM STUDI MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH, APABILA DI KEMUDIAN HARI TERBUKTI BAHWA PERNYATAAN INI TIDAK BENAR MAKA SAYA SANGGUP MENERIMA HUKUMAN/SANKSI SESUAI PERATURAN YANG BERLAKU”

Banda Aceh, **Agustus 2024**
Yang Menyatakan



LASMAWATI

NPM : 2202120236

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : LASMAWATI
NPM : 2202120236
Program Studi : Manajemen
Fakultas : Ekonomi
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh **Hak Bebas Royalty Non Eklusif (*Non-Exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan Hak Royalty Non-Eksklusif ini Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada Tanggal : Agustus 2024

Banda Aceh, Agustus 2024
Yang Menyatakan



ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

LASMAWATI
NPM. 2202120236

Pembimbing 1. H. Zulkifli Umar, S.E,M.Si, Ak.CA
Pembimbing 2. Syamsidar, S.E,M.Si, Ak.CA

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Kinerja Keuangan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat Daya dengan menggunakan rasio efektivitas, rasio efesiensi dan rasio keserasian. Penelitian ini menggunakan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Jenis data yang digunakan data primer dan data yang diperoleh dari laporan Realisasi Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat Daya Periode 2021-2023. Analisis data yang digunakan deskriptif kualitatif dengan rumus: rasio efektivitas, rasio efesiensi dan rasio keserasian. Hasil analisis menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat Daya dilihat dari (1) rasio efektivitas berjalan sudah efektif (2) rasio efesiensi pada tahun 2021 dan 2023 berjalan kurang efisien karena nilai rasionya berkisar antara 90-100% sedangkan tahun 2022 sudah cukup efisien nilai rasionya 80-90% (3) rasio keserasian diketahui bahwa rata-rata belanja modal 20% sehingga dapat dikatakan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Barat Daya masih diprioritaskan untuk kebutuhan belanja operasi sehingga rasio belanja modal relatif kecil.

Kata Kunci: *Kinerja Keuangan, Rasio Efektivitas, Rasio Efesiensi, Rasio Keserasian.*

**ANALYSIS OF THE FINANCIAL PERFORMANCE OF THE EDUCATION
AND CULTURE OFFICE OF THE SOUTHWEST ACEH DISTRICT**

LASMAWATI
NPM. 2202120236

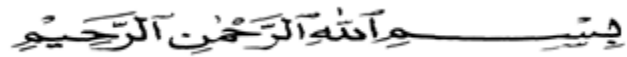
Pembimbing 1. H. Zulkifli Umar, S.E,M.Si, Ak.CA
Pembimbing 2. Syamsidar, S.E,M.Si, Ak.CA

ABSTRACT

This study aims to analyse the financial performance of Southwest Aceh Regency Education and Culture of Southwest Aceh Regency using effectiveness ratio, efficiency ratio and harmony ratio. This research uses with qualitative descriptive approach. The type of data used is primary data and Data obtained from the Budget Realisation Report of Education and Culture Office of Southwest Aceh Regency for the period 2021-2023. Culture of Southwest Aceh Regency for the period 2021-2023. Data Analysis used qualitative descriptive with formulas: effectiveness ratio, efficiency ratio and harmony ratio. The results of the analysis show that the financial performance of the Education and Culture of Southwest Aceh Regency seen from (1) the effectiveness ratio runs effectively (2) the efficiency ratio runs less efficiently because the (2) the efficiency ratio is running less efficiently because the (3) the compatibility ratio is known that the average capital expenditure is 20%, so it is said that the Education and Culture Office of Southwest Aceh Regency is 20%. capital expenditure is 20%, so it can be said that the Education and Culture Office of Southwest Aceh Regency is still prioritised. Culture of Southwest Aceh is still prioritised for operating expenditure needs, so the ratio of capital expenditure is relatively small. So the ratio of capital expenditure is relatively small.

Keywords: Financial performance, effectiveness ratio, efficiency ratio, compatibility ratio,Compatibility.

KATA PENGANTAR



Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, serta shalawat beserta salam untuk junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Kinerja Keuangan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat Daya**”

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi persyaratan dalam rangka memenuhi syarat studi untuk mendapatkan gelar Sarjana pada Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh. Penulis sangat menyadari di dalam penulisan ini masih terdapat kekurangan-kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan dan kemampuan penulis. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan membangun untuk menyempurnakan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis sadar betul dengan kemampuan yang dimiliki. Tiada daya dan upaya melainkan semuanya karena gerakan pertolongan Allah semata, dan berkat Baginda Mulia Nabi Muhammad Saw dan tentunya doa yang tidak henti-hentinya daripada kedua orang tua tercinta dan juga keluarga. Disamping itu juga, hambatan halangan senantiasa silih berganti seiring proses penyusunan skripsi ini. terselesaikannya skripsi ini tentu memiliki peran dan kontribusi dari berbagai pihak, baik bantuan, arahan, bimbingan bahkan do’a yang tak henti-hentinya. Oleh karena itu rasanya penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar besarnya kepada:

1. Suami dan anak-anak tercinta, suami Akmal dan anak-anak yang sudah menjadi motivator dan inspirator dalam kesuksesan untuk menyelesaikan skripsi. Pengorbanan dan iringan do'a yang senantiasa tercurahkan kepada penulis hingga sampai tahap ini.
2. Orang tua tercinta, Ayahanda Ali Akbar dan ibunda Zaidah. Terimakasih atas segala cinta, kasih sayang, do'a dan inspirasi serta dukungan yang selama ini tercurah kepada ananda.
3. Bapak H. Zulkifli Umar, S.E,M.Si, Ak.CA selaku pembimbing I dan Ibu Syamsidar, S.E,M.Si, Ak.CA selaku pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing dan memberikan arahan dalam proses pelaksanaan penelitian sehingga terselesaikan skripsi ini dengan baik.
4. Dekan dan civitas akademika Fakultas Ekonomi yang senantiasa membantu dan mengarahkan penulis. Semoga senantiasa selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah SWT.

Tentunya penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan belum sepenuhnya sempurna, oleh karena itu penulis meminta maaf dan penulis dengan segala kerendahan hati menerima kritik dan saran yang membangun dalam supaya tercapainya kesempurnaan skripsi ini dan tercapainya kebaikan pada masa yang akan datang.

Akhir Kalam, dengan kerendahan hati dan segala kekurangan, penulis serahkan segala usaha dan urusan kepada Allah SWT dengan selalu memohon pertolongan dan lindungannya agar semua kebaikan dan kemudahan pada kita semua dan agar senantiasa ridho-Nya kepada semua pihak yang telah berjasa dalam

penulisan skripsi ini agar mendapat imbalan yang baik di dunia maupun diakhirat kelak. Semoga amal penulis dalam menyelesaikan pendidikan dan skripsi ini dapat dicatat sebagai amal ibadah yang dapat memberikan manfaat kepada orang lain.

Aceh Barat Daya, Agustus 2024

Penulis

Lasmawati

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Ruang Lingkup Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Pengertian Kinerja Keuangan	8
2.1.1.1 Pengukuran Kinerja Keuangan.....	9
2.1.1.2 Manfaat Pengukuran Kinerja.....	10
2.1.1.3 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kinerja.....	10
2.1.2 Pengertian Laporan Keuangan.....	11
2.1.2.1 Jenis-jenis Laporan Keuangan	12
2.1.2.2 Tujuan Laporan Keuangan	13
2.1.3 Pengertian Rasio Keuangan.....	14
2.2 Penelitian Sebelumnya.....	20
2.3 Kerangka Pemikiran	27
BAB III METODE PENELITIAN	28
3.1 Desain Penelitian	28
3.1.1 Lokasi dan Objek Penelitian	28
3.1.2 Jenis Penelitian.....	28
3.1.3 Horizon Waktu.....	28
3.2 Sumber data	28
3.3 Teknik Pengumpulan Data	29
3.4 Metode Analisis Data	29

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	31
4.1 Profil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Barat Daya.....	31
4.2 Hasil Penelitian	36
4.3 Pembahasan	43
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	46
5.1 Kesimpulan	46
5.2 Saran	47
DAFTAR PUSTAKA.....	48
Lampiran	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Ringkasan Laporan Keuangan Anggaran	4
Tabel 1.2 Ringkasan Laporan Keuangan Anggaran	4
Tabel 2.1 Penelitian Sebelumnya	20
Tabel 2.2 Anggaran Realisasi DISDIKBUD ABDYA	36
Tabel 2.3 Kriteria Tingkat Efektivitas	37
Tabel 2.4 Efektivitas Belanja DISDIKBUD ABDYA.....	37
Tabel 2.5 Kriteria Tingkat Efisien.....	39
Tabel 2.6 Efisiensi Belanja DISDIKBUD ABDYA	39
Tabel 2.7 Rasio Keserasian DISDIKBUD ABDYA.....	41

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	27
Gambar 2.2 Struktur Organisasi.....	35

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintah merupakan suatu organisasi yang diberi kekuasaan untuk mengatur kepentingan Bangsa dan Negara. Lembaga Pemerintahan dibentuk untuk menjalankan layanan kepada masyarakat luas dan sebagai organisasi nirlaba mempunyai tujuan bukan mencari keuntungan akan tetapi menyediakan layanan dan kemampuan meningkatkan pelayanan tersebut dimasa yang akan datang.

Banyak aspek kehidupan masyarakat di dunia telah diubah oleh era globalisasi dan keterbukaan. Dalam suatu negara, aliran informasi dan berbagai sumber daya secara regional telah membawa perubahan yang dinamis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Barat Daya berusaha meningkatkan daya saingnya untuk tetap menjadi bagian dari bangsa Indonesia dan mampu beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Mereka juga berusaha menjadi komunitas terbaik yang diperhitungkan dalam peraturan nasional dan dunia, salah satunya dengan menggunakan teknologi penganalisis laporan keuangan.

Perkembangan teknologi yang terus meningkat dengan pesat menyebabkan semakin diperlukannya keahlian dalam menganalisis laporan keuangan. Dengan penganalisis laporan keuangan akan membantu pihak-pihak yang berkepentingan dalam memilih dan mengevaluasi informasi dan hanya berfokus dengan informasi tersebut. Kegiatan analisis laporan keuangan merupakan salah satu media untuk mendapatkan informasi yang lebih banyak,

baik, akurat, dan dijadikan sebagai bahan dalam proses pengambilan keputusan. Analisis laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan serta hasil-hasil yang telah dicapai sehubungan dengan pemilihan strategi perusahaan yang akan ditetapkan.

Kasmir, (2010) tujuan analisis laporan keuangan pada dasarnya untuk menilai keadaan keuangan perusahaan di masa lalu, saat ini, dan kemungkinan di masa yang akan datang. Informasi posisi keuangan dimasa lalu sering kali dijadikan dasar untuk memprediksi posisi keuangan dimasa yang akan datang. Selain itu, tujuan laporan keuangan juga memberikan informasi keuangan sebagai salah satu sumber untuk mendukung penguatan dalam pengambilan keputusan khususnya dari sisi keuangan perusahaan.

Dalam menganalisis kinerja keuangan, sering kita menggunakan analisis rasio keuangan sebagai indikator penilaian dan banyak diterapkan oleh para analisis di pasar modal untuk memprediksikan keuntungan atau kinerja lembaga pemerintahan. Dengan menggunakan metode analisis rasio-rasio keuangan itu pula, kita dapat mengetahui dan mendapati adanya kenaikan atau penurunan kinerja keuangan lembaga pemerintahan pada suatu periode tertentu. Anggaran dilaksanakan pada periode satu tahun kedepan yang tentunya mengacu kepada anggaran dan realisasi yang dicapai pada tahun sebelumnya yang dipergunakan sebagai tolak ukur pembuatan anggaran berikutnya.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara APBN merupakan wujud pengelolaan keuangan Negara yang di tetapkan tiap tahun dengan undang-undang.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah yang memberikan definisi otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Daerah otonomi daerah yang secara resmi diberlakukan di Indonesia menghendaki daerah untuk mencari sumber penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan.

Salah alat untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah adalah dengan melaksanakan analisis rasio terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya. Kinerja keuangan daerah merupakan pencapaian atas apa yang direncanakan baik oleh pribadi maupun organisasi. Apabila pencapaian sesuai dengan yang direncanakan maka kinerja yang dilakukan terlaksana dengan baik. Apabila pencapaian melebihi dari apa yang direncanakan dapat dikatakan sangat baik.

Analisis kinerja rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari suatu periode ke periode sebelumnya sehingga dapat diketahui kecenderungan yang terjadi. Selain itu dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan dengan rasio keuangan pemerintah daerah tertentu dengan rasio keuangan daerah lain yang terdekat ataupun potensi daerahnya relatif sama untuk dilihat bagaimana posisi keuangan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah lainnya. Analisis rasio APBD adalah usaha untuk mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia.

Laporan Realisasi Anggaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat Daya tahun 2022-2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1

Ringkasan Laporan Keuangan Anggaran Belanja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2022-2023

Tahun	Anggaran	Realisasi Anggaran	Silpa	%
2021	211,701,457,406	202,809,912,150	8,891,545,256	95,80
2022	226.635.140.230,00	218.312.837.056,00	8.322.303.174	96,33
2023	191.648.909.973	187.878.541.755,00	3.770.368.218	98,03

Sumber: Data di olah (2024)

Tabel 1.2

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2022-2023

Tahun	Keterangan	Anggaran	Realisasi	%
2021	Belanja	211,701,457,406	202,809,912,150	95,80
	Belanja Operasi	169,018,321,279	160,752,142,164	95,11
	Belanja Modal	42,683,136,127	42,057,769,986	98,53
2022	Belanja	226.635.140.235,00	218.312.837.056,00	96,03
	Belanja Operasi	180.360.302.120,00	172.885.195.971,00	95,86
	Belanja Modal	46.274.838.115,00	45.427.641.085,00	98,17
2023	Belanja	191.648.909.973	187.878.541.755,00	98,03
	Belanja Operasi	173.267.837.933	169.620.546.676,00	97,99
	Belanja Modal	18.381.072.040	18.257.995.079,00	99,33

Sumber: Data di olah (2024)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa dari tahun 2021, 2022 sampai dengan tahun 2023 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat Daya mengalami sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA). Jika melihat pada anggaran tahun 2021 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat Daya, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp. 211,701,457,406. Sedangkan realisasi sebesar Rp. 202,809,912,150. Silpa sebesar 8,891,541,256 rasionya sebesar 95,80%.

Tahun 2022 anggaran Pendapatan sebesar Rp. 226.635.140.235,00. Sedangkan realisasi sebesar Rp. 218.312.837.056,00, silpa sebesar 8.322.303.174 tingkat rasionya sebesar 96,33%. Kemudian pada tahun 2023 jumlah anggaran 191.648.909.973 dengan realisasi anggarannya 187.878.541.755,00 dengan nilai rasionya 98,03%.

Kelebihan anggaran ini disebabkan dengan kurangnya pemanfaatan anggaran akibat kekurangan belanja tidak sesuai dengan jumlah anggaran yang telah ditentukan sehingga menyebabkan kelebihan anggaran. Kelebihan anggaran juga disebabkan dengan kurangnya program-program tertentu sehingga kurang pemanfaatan dalam menghabiskan jumlah anggaran yang telah ditentukan. Berdasarkan rasio di atas tingkat belanja anggaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Barat Daya perbandingan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) pada tahun 2022 dengan 2023 mengalami penurunan. Dalam hal realisasi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat Daya mengalami peningkatan dari tahun 2022 sebesar 96.33%, sedangkan 2023 sebesar 98.03%. Maka sudah termasuk kategori efektif, kinerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat Daya, dalam mengelola Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) bisa ketegorikan belum efisien karna hasil perbandingan masih mencapai 90%-100%.

Dasar yang dapat digunakan pada pengukuran kinerja keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat Daya digunakan dalam penelitian ini adalah rasio efektivitas, rasio efisiensi keuangan daerah dan rasio keserasian. Dengan adanya analisis laporan keuangan, pemerintah dapat mempertahankan atau meningkatkan yang sudah diterimanya saat ini

dengan memperhatikan prinsip *value of money* yang terdiri atas ekonomi, efektivitas dan efisien untuk mendorong terjadinya pertumbuhan pengelolaan keuangan.

Oleh karna itu, berdasarkan permasalahan diatas tentu menarik untuk dilakukan penelitian dalam bentuk Skripsi yang berjudul “**Analisis Kinerja Keuangan Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Kabupaten Aceh Barat Daya.**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Bagaimana kinerja keuangan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Barat Daya dilihat dari rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan rasio keserasian?”

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Barat Daya dilihat dari rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan rasio keserasian.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Dapat menjadi bahan referensi peneltian-penelitian selanjutnya terutama yang berkaitan dengan sumber daya manusia.

2. Manfaat Teoritis

Sebagai bahan masukan dan pertimbangan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat Daya dan memberikan sumbangan pemikiran kepada Dinas Pendidikan dan kebudayaan Aceh Barat Daya.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat Daya. Dengan analisis kinerja keuangan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat Daya tahun 2022-2023

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

2.1 Pengertian Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan ialah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Seperti dengan membantu laporan keuangan yang telah memenuhi standar dan ketentuan dalam SAK (Standar Akuntansi Keuangan) atau GAP (*General Accepted Accounting Principle*). Kinerja keuangan ialah gambaran dari pencapaian keberhasilan perusahaan dapat diartikan sebagai hasil yang telah dicapai atas berbagai aktivitas yang telah dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar (Fahmi,2018:2).

Kinerja keuangan menurut Santoro dalam (Sarangih, 2017) merupakan hasil nyata yang dicapai suatu badan usaha dalam suatu periode tertentu yang dapat mencerminkan tingkat kesehatan keuangan badan usaha tertentu dan dipergunakan untuk menunjukkan tercapainya hasil yang positif. Kinerja keuangan melibatkan penilaian terhadap kondisi keuangan dimasa lalu, sekarang dan yang akan datang. Disisi lain kinerja keuangan menggambarkan kekuatan struktur keuangan suatu perusahaan dan sejauh mana dengan aset yang tersedia perusahaan sanggup meraih keuntungan.

Menurut Sucipto (2003), mendefenisikan kinerja keuangan yaitu penentuan ukuran-ukuran tertentu yang dapat mengukur keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan dalam menghasilkan laba.

2.1.1.2 Pengukuran Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan perusahaan sangat erat berkaitan dengan pengukuran dan penilaian kinerja, pengukuran kinerja (*performing measurement*) adalah kualifikasi dan efesiensi serta efektivitas perusahaan dalam pengoperasian bisnis selama periode akuntansi.

Adapun penilaian kinerja keuangan menurut Srimindari (2006:34) ialah penentuan efektivitas operasional, organisasi, dan karyawan berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya secara periodik (dalam Riadi, 2016). Pengukuran keuangan digunakan perusahaan untuk melakukan perbaikan di atas kegiatan operasionalnya agar dapat bersaing dengan perusahaan lain. Analisis kinerja keuangan merupakan proses pengkajian secara kritis terhadap review data, menghitung, mengukur, menginterpretasi, dan memberi solusi terhadap keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu.

Pengukuran kinerja sangat penting untuk membantu para pengambilan keputusan dalam memantau atau memperbaiki kinerja serta berfokus pada tujuan instansi dan untuk menilai akuntabilitas instansi bahwa anggaran telah dilaksanakan seacara efektif, efesien, dan ekonomis serta pimpinan memberikan pelayanan publik yang lebih baik (Ismail & Irwan, 2021).

Belanja merupakan kegiatan rutin pemerintah menjadi momok dan rentan akan kebocoran dan efensiensi jika tidak dilakukan perencanaan,

pengawasan serta pengendalian yang baik, oleh sebab itu analisis belanja mutlak harus dilakukan agar menjadi dasar evaluasi, perbaikan dan koreksi kedepan (Oktaviani,2020). Selain itu belanja menjadi komponen yang penting bagi masyarakat selaku pemberi pajak daaeah untuk mengetahui dan menilai anggaran belanja yang dikelola pemerintah telah dilaksanakan untuk kepentingan publik, efektif dan efesiensi (Puspita dkk,2021).

2.1.1.3 Manfaat Pengukuran Kinerja

Menurut Kasmir (2013:11) adapun manfaat dari pengukuran kinerja keuangan sebagai berikut:

1. Untuk mengukur prestasi yang telah diperoleh suatu organisasi secara keseluruhan dalam suatu periode tertentu pengukuran ini mencerminkan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan.
2. Sebagai dasar penentuan strategi perusahaan untuk masa yang akan datang
3. Untuk memberikan petunjuk dalam pembuatan keputusan dan kegiatan organisasi pada umumnya dan divisi atau bagian dari organisasi pada khususnya
4. Sebagai dasar penentuan kebijaksanaan penanaman modal agar dapat meningkatkan efesiensi dan produktivitas perusahaan
5. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara obyektif

2.1.1.4 Faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja sebagai berikut:

1. Pegawai, berkaitan dengan kemampuan dan kemauan dalam bekerja
2. Pekerjaan, menyangkut desain pekerjaan uraian pekerjaan dan sumber daya untuk melaksanakan pekerjaan
3. Mekanisme, mencakup sistem, prosedur pendelegasian dan pengendalian serta struktur organisasi

4. Lingkungan kerja, meliputi faktor-faktor lokasi dan kondisi kerja, iklim organisasi dan komunikasi.

2.1.2 Pengertian Laporan Keuangan

Laporan Menurut PSAK No. 1 (2015:1), laporan keuangan adalah penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Laporan ini menampilkan sejarah entitas yang di kuantifikasi dalam nilai moneter. keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan atau organisasi pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan atau organisasi, laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan.

Menurut Myer dalam buku Financial Statement Anlysis (S. Munawir, 2007:5) laporan keuangan adalah dua daftar yang disusun oleh akuntan pada akhir suatu periode, kedua daftar tersebut adalah daftar neraca dan posisi keuangan serta daftar pendapatan atau daftar laba rugi.

Menurut Winwin (2007: 51) laporan keuangan merupakan informasi keuangan yang disajikan dan disiapkan oleh manajemen dari suatu perusahaan kepada pihak internal dan eksternal yang berisis kegiatan bisnis dari suatu kesatuan usaha yang merupakan salah satu alat pertanggungjawaban dan komunikasi manajemen kepada pihak-pihak yang membutuhkannya.

Menurut Soermarso dalam (Suteja, 2018) laporan keuangan adalah laporan yang dirancang untuk para pembuat keputusan, terutama pihak di luar perusahaan, mengenai posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan.

2.1.2.3 Jenis-jenis Laporan Keuangan

Adapun jenis-jenis dari laporan keuangan menurut Harahap (2008: 52) merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. sebagai berikut:

a. Neraca

Neraca ialah laporan yang menggambarkan posisi keuangan dari suatu perusahaan yang meliputi aktiva, kewajiban dan ekuitas pada suatu saat tertentu. Neraca merupakan salah satu jenis laporan keuangan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada akhir periode.

b. Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi mengenai pendapatan, beban, dan laba atau rugi suatu perusahaan dalam suatu periode tertentu. Laporan ini menggambarkan dua macam arus yang terbentuk laba atau rugi, dikatakan laba apabila pendapatan lebih besar dan biaya-biaya pada periode yang sama sebaliknya rugi apabila pendapatan yang di peroleh lebih kecil dibandingkan biaya-biaya yang dikeluarkan pada periode yang bersangkutan.

c. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas adalah laporan yang menggambarkan penerimaan dan pengeluaran kas selama satu periode tertentu. Laporan arus kas memberi gambaran penggunaan kas pada bagian aktivitas dari sebuah perusahaan yang berhubungan dengan pemasukan dan pengeluaran kas. Tiga bagian dalam laporan arus kas bagian yaitu kas dari aktivitas operasi, kas

dari aktivitas investasi, kas dari aktivitas pendanaan. Laporan arus kas merupakan informasi yang berguna bagi para pemakai laporan keuangan sebagai dasar untuk menilai kebutuhan perusahaan untuk menggunakan arus kas tersebut.

d. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan ialah sebuah informasi maupun catatan tambahan yang ditambahkan untuk member penjelasan kepada pembaca atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan memberikan bantuan penjelasan perhitungan item tertentu dalam laporan keuangan. Catatan laporan keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk menghasilkan laporan keuangan secara wajar.

2.1.2.4 Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkan tentang kondisi suatu perusahaan dari sudut angka-angka dalam satuan moneter. Tujuan laporan keuangan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) (Sari, 2017) yaitu memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi.

Tujuan laporan keuangan menurut Kasmir (2013:11) sebagai berikut:

- 1) Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang dimiliki perusahaan saat ini.
- 2) Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
- 3) Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu.
- 4) Memberikan informasi tentang jumlah biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu.
- 5) Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva, dan modal perusahaan.
- 6) Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu periode.

2.1.3 Pengertian Rasio Keuangan

Rasio keuangan dapat digunakan sebagai evaluasi kondisi keuangan serta kinerja perusahaan. Yang mana hasil dari rasio keuangan itu akan terlihat jelas kondisi kesehatan dari perusahaan yang bersangkutan.

Analisis rasio keuangan merupakan perhitungan yang dirancang untuk membantu mengevaluasi laporan keuangan. Teknik dengan menggunakan rasio ini merupakan cara yang saat ini masih paling efektif dalam mengukur tingkat kinerja serta prestasi keuangan perusahaan.

Analisis rasio keuangan sendiri dimulai dengan laporan keuangan dasar yaitu dari neraca, perhitungan laba rugi (*income statement*) dan laporan arus kas (*cash flow statement*). Perhitungan rasio keuangan akan menjadi

lebih jelas jika dihubungkan antara lain dengan menggunakan pola historis perusahaan tersebut yang dilihat perhitungan memburuk atau melakukan perbandingan dengan perusahaan lain dalam industri yang sama. Hasil rasio keuangan sangat berguna bagi pengembangan atas kebijakan perusahaan itu sendiri maupun pertimbangan dari pihak luar perusahaan, seperti bank dalam memberikan fasilitas kredit dan investor dalam merencanakan modalnya.

Untuk menghasilkan analisa rasio yang menggambarkan keadaan keuangan perusahaan tidaklah hanya dengan menganalisa rasio itu sendiri-sendiri, namun juga dituntun rasio sebagai pembanding. Bagaimana yang dikemukakan oleh S. Munawir (1990:65):

“Rasio menggambarkan suatu hubungan atau perimbangan *mathematical relationship* antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain dan juga dengan menggunakan alat analisa beberapa ratio akan dapat menjelaskan atau memberikan gambaran kepada penganalisa tentang baik dan buruknya keadaan atau posisi keuangan suatu perusahaan terutama apabila angka rasio tersebut dibandingkan dengan rasio pembanding yang digunakan sebagai standar”

Ada beberapa cara untuk mengukur kinerja keuangan daerah salah satunya dengan menggunakan analisa keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui kecenderungan yang terjadi. Beberapa rasio yang bisa digunakan yaitu:

a. Rasio Efektivitas

Menurut Halim (2012), rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan yang direncanakan. Suatu daerah dapat dikatakan efektif apabila jumlah realisasi penerimaan PAD lebih besar dibandingkan target penerimaan PAD dan begitu pula sebaliknya. Rasio efektivitas keuangan daerah diukur dengan cara realisasi penerimaan PAD terhadap target penerimaan PAD.

Menurut Mardiasmo (2018:132) efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan. Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan dan sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*). Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (*outcome*) dari keluaran (*output*) program dalam mencapai tujuan program.

Menurut Halim (2014:271)

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{realisasi pendapatan}}{\text{anggaran pendapatan}} \times 100\%$$

kriteria rasio efektivitas menurut Mohammad Mahsun (2009)

adalah:

- 1) Jika diperoleh nilai kurang dari 100% ($x < 100\%$) berarti tidak efektif

- 2) Jika diperoleh nilai sama dengan 100% ($x=100\%$) berarti efektivitas seimbang
- 3) Jika diperoleh nilai lebih dari 100% ($x>100\%$) berarti efektif

b. Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi Keuangan Daerah (REKD) menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Keuangan pemerintah daerah semakin baik. Rasio efisiensi menggambarkan tingkat kemampuan pemerintah dalam mengefesiensikan biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Menurut Maardiasmo (2018:98) efisiensi ialah hubungan erat dengan konsep produktifitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (*cost of output*). Kegiatan proses operasional bisa dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya.

Menurut Mahmudi (2017:22) Efisiensi terkait dengan hubungan antara output berupa barang atau pelayanan yang dihasilkan dengan sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan *output* tersebut. Sedangkan menurut Raharjo (2017:169) mengatakan bahwa efisiensi merupakan suatu kondisi atau keadaan dimana penyelesaian suatu pekerjaan dilaksanakan dengan benar dan

penuh kemampuan yang dimiliki. Secara matematis, efisiensi merupakan perbandingan antara *output* dan *input* atau dengan istilah lainnya *output* per unit *input*.

Menurut Mahsun (2014:84) alat rasio keuangan yang digunakan adalah analisis rasio yang dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari laporan realisasi anggaran. Perhitungan tingkat efisiensi anggaran belanja yang dapat hitung dengan membandingkan tingkat realisasi anggaran belanja dengan realisasi anggaran belanja langsung. Anggaran belanja yang dimaksud adalah total beanja dari belanja langsung dan belanja tidak langsung.

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{realisasi belanja daerah}}{\text{anggaran pendapatan daerah}} \times 100\%$$

Kriteria Efisiensi	Persentase Efisiensi
100% keatas	Tidak Efisiensi
90%-100	Kurang Efisiensi
80%-90%	Cukup Efisiensi
Kurang dari 60%	Sangat Efisiensi

c. Rasio Keserasian

Rasio keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunannya secara optimal.

Ada dua perhitungan dalam Rasio Keserasian, yaitu:

1) Rasio Belanja Operasional

Rasio belanja operasional merupakan perbandingan antara total belanja dengan total belanja daerah. Belanja operasi merupakan belanja yang manfaatnya habis dikonsumsi dalam satu tahun anggaran, sehingga sifatnya jangka pendek dan dalam hal tertentu sifatnya rutin dan berulang.

$$\text{Rasio Belanja Operasional} = \frac{\text{total belanja operasi}}{\text{total belanja daerah}} \times 100\%$$

2) Rasio Belanja Modal

Rasio belanja modal merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah. Berdasarkan rasio ini, pembaca laporan dapat mengetahui porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dengan bentuk belanja modal pada tahun anggaran bersangkutan.

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{total belanja modal}}{\text{total belanja daerah}} \times 100\%$$

2.2 Penelitian Sebelumnya

Adanya penelitian-penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya sangat berperan penting dalam sebuah penelitian yang akan dilakukan. Karena dengan adanya penelitian sebelumnya maka penulis dapat terbantu dalam penulisan penelitian yang akan dihadapi. Adapun beberapa penelitian sebelumnya yang mendasari penelitian ini sebagai berikut:

Firdaus (2016) dengan judul “Analisis Kinerja Keuangan Pada Dinas Perhubungan Informasi dan Informatika Kabupaten Rokan Hulu”. Dapat disimpulkan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio efesiensi Dinas Perhubungan Informasi dan Informatika Kabupaten Rokan Hulu tahun 2011 sampai dengan 2014 berada dalam kondisi tidak efesiensi dengan rasio rata-rata sebesar 1.338%. seacara rata-rata rasio efektivitas tahun 2011 sampai dengan 2014 berada dalam kondisi sangat efektif dengan nilai rasio sebesar 121%. Rasio kemandirian tahun 2011 sampai 2014 berada dalam pola hubungan delegatif. Rasio pertumbuhan PAD tahun 2012 sampai dengan 2014 terjadi pertumbuhan yang positif.

Triolivia (2018) “Analisis Kinerja Keuangan Pada Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan”. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan dapat diukur melalui rasio efektivitas, rasio efesiensi, rasio keserasian dan rasio pertumbuhan, dimana dalam rasio tersebut realisasi dan anggaran PAD tahun 2020-2021, dan terdapat adanya ketidaksesuaian pada realisasi dan anggaran PAD tahun 2020-2021.

Tugiyono (2022) “Analisi Kinerja Keuangan Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahu 2018-2020”.

Hasil dari penelitian menunjukkan, kinerja keuangan pendapatan baik dengan rata-rata target realisasi pendapatan sebesar 116,51%. Kinerja keuangan belanja juga sudah cukup baik dilihat dari keserasian belanja yaitu rata-rata belanja operasi sebesar 91,91% dan belanja modal sebesar 0,76%. Efisiensi belanja juga telah dilaksanakan terlihat dari realisasi anggaran belanja yang tidak melebihi pagu anggaran belanja sehingga mendapatkan SILPA surplus (sisa lebih perhitungan anggaran) dari efisiensi belanja.

Erma Julaida Harahap (2021) “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara (Studi Kasus pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara”. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan BPKPD Kabupaten Padang Lawas Utara dilihat dari Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal setelah melakukan analisis bisa dikatakan sangat kurang, karena rata-ratanya sebesar 4,74%. Rasio Kemandiran keuangan dengan pola hubungannya masih tergolong dalam hubungan Instruktif karena rata-rata rasionya sebesar 7,07%. Rasio Efektivitas PAD Kabupaten Padang Lawas sudah tergolong efektif karena efektivitasnya diatas 100% yaitu 91,69%. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara dapat dikatakan efisien karena rata-rata efesinnya sebesar 94,74%. Rasio Keserasian diketahui bahwa rata-rata belanja modal sebesar 24% sehingga dapat dikatakab bahwa Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara masih diprioritaskan untuk kebutuhan belanja operasi sehingga rasio belanja modal relative kecil.

Sri Septiana “Analisis Kinerja Keuangan Pada Dinas Perhubungan Kota Batam Berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2013-2017”. Hasil

menunjukkan rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah yang sangat tinggi dengan pola delegatif, rasio efektivitas kinerja keuangan kota batam sudah efektif karena efektivitas rata-rata di atas 100%, yaitu 103,27%. Rasio efesiensi keuangan daerah dapat dikatakan tidak efesien karena rata-rata efesinsi keuangan daerah Kota Batam adalah 487,57%, rasio aktivitas diketahui bahwa rata-rata pengeluaran operasional daerah masih sangat tinggi yaitu 53,92% dibandingkan dengan belanja modal rata-rata 46,08% sehingga dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah masih belum memperhatikan pembangunan daerah, rasio pertumbuhan belanja pendapatan asli daerah, rasio pertumbuhan pendapatan, rasio pertumbuhan belanja operasi, dan rasio pertumbuhan belanja modal mengalami pertumbuhan yang positif.

Tabel 2.1
Penelitian Sebelumnya

NO	Nama Penelitian & Tahun	Judul Penelitian	Model Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Firdaus (2016)	Analisis Kinerja Keuangan Pada Dinas Perhubungan Informasi dan Informatika Kab. Rokan Hulu	Penelitian Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio efesiensi Dinas Perhubungan Informasi dan Informatika Kabupaten Rokan Hulu tahun 2011 sampai dengan 2014 berada dalam kondisi tidak efesiensi dengan rasio rata-rata sebesar 1.338%. secara rata-rata rasio efektivitas tahun	Menggunakan metode deskriptif kualitatif	-Lokasi penelitian -Sampel

				2011 sampai dengan 2014 berada dalam kondisi sangat efektif dengan nilai rasio sebesar 121%. Rasio kemandirian tahun 2011 sampai 2014 berada dalam pola hubungan delegatif. Rasio pertumbuhan PAD tahun 2012 sampai dengan 2014 terjadi pertumbuhan yang positif.		
2	Tri Olivia tandi angin (2022)	Analisis Kinerja Keuangan Pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan	Penelitian Kuantitatif	Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan dapat diukur melalui rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio keserasian dan rasio pertumbuhan, dimana dalam rasio tersebut realisasi dan anggaran PAD tahun 2020-2021, dan terdapat adanya ketidaksesuaian pada realisasi dan anggaran PAD tahun 2020-2021.	Menggunakan rasio efektivitas, rasio efisiensi	Lokasi penelitian, Menggunakan metode Kuantitatif

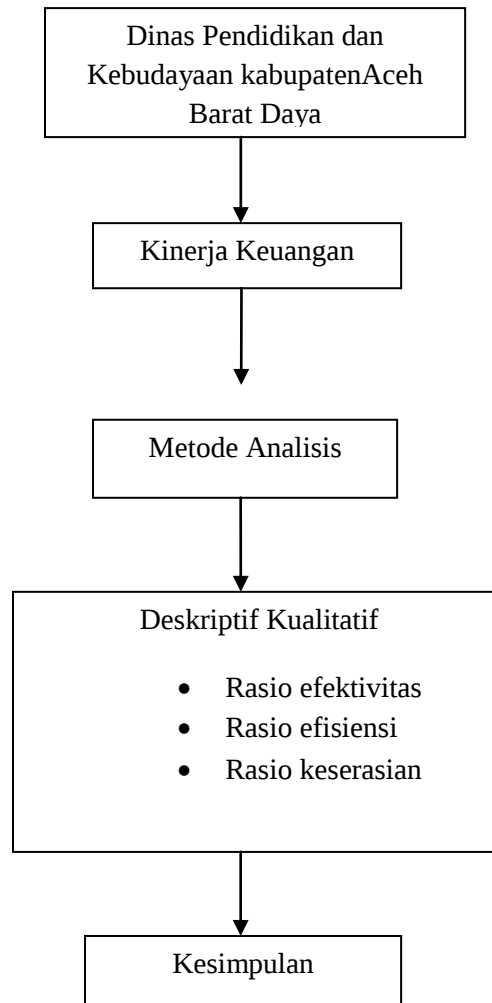
3	Tugiyono Sanyoto (2022)	Analisis Kinerja Keuangan Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2018-2020	Penelitian Kuantitatif	Hasil dari penelitian menunjukkan, kinerja keuangan pendapatan baik dengan rata-rata target realisasi pendapatan sebesar 116,51%. Kinerja keuangan belanja juga sudah cukup baik dilihat dari keserasian belanja yaitu rata-rata belanja operasi sebesar 91,91% dan belanja modal sebesar 0,76%. Efisiensi belanja juga telah dilaksanakan terlihat dari realisasi anggaran belanja yang tidak melebihi pagu anggaran belanja sehingga mendapatkan SILPA surplus (sisa lebih perhitungan anggaran) dari efisiensi belanja.	Menggunakan rasio efektivitas, rasio efisiensi dan rasio keserasian	Lokasi Penelitian, Menggunakan Metode Kuantitatif
4	Sri Septiana (2019)	Analisis Kinerja Keuangan Pada Dinas Perhubungan Kota Batam Berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2013-2017	Penelitian Deskriptif Kuantitatif	Hasil menunjukkan rata-rata rasio kemandiran keuangan daerah yang sangat tinggi dengan pola delegatif, rasio efektivitas kinerja keuangan kota Batam sudah efektif karena efektivitas rata-rata di atas 100%, yaitu	Menggunakan rasio efektivitas, rasio efisiensi.	-Lokasi Penelitian -Metode Penelitian -Rasio Kemandiran -Rasio Pertumbuhan

				103,27%. Rasio efisiensi keuangan daerah dapat dikatakan tidak efisien karena rata-rata efisiensi keuangan daerah Kota Batam adalah 487,57%, rasio aktivitas diketahui bahwa rata-rata pengeluaran operasional daerah masih sangat tinggi yaitu 53,92% dibandingkan dengan belanja modal rata-rata 46,08% sehingga dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah masih belum memperhatikan pembangunan daerah, rasio pertumbuhan belanja pendapatan asli daerah, rasio pertumbuhan pendapatan, rasio pertumbuhan belanja operasi, dan rasio pertumbuhan belanja modal mengalami pertumbuhan yang positif		
5	Erma Julaida Harahap (2021)	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara (Studi Kasus pada Badan	Penelitian Deskriptif Kualitatif	Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan BPKPD Kabupaten Padang Lawas Utara dilihat dari Rasio Derajat	Menggunakan metode Kualitatif -Rasio Efektivitas -rasio Efisiensi -Rasio Keserasian	-Lokasi Penelitian -Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal -Rasio Kemandirian Keuangan

		Pengelolaan Keuangan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara)		Desentralisasi Fiskal setelah melakukan analisis bisa dikatakan sangat kurang, karena rata-ratanya sebesar 4,74%. Rasio Kemandiran keuangan dengan pola hubungannya masih tergolong dalam hubungan Instruktif karena rata-rata rasionya sebesar 7,07%. Rasio Efektivitas PAD Kabupaten Padang Lawas sudah tergolong efektif karena efektivitasnya diatas 100% yaitu 91,69%. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara dapat dikatakan efisien karena rata-rata efesinnya sebesar 94,74%. Rasio Keserasian diketahui bahwa rata-rata belanja modal sebesar 24% sehingga dapat dikatakab bahwa Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara masih diprioritaskan untuk kebutuhan belanja operasi sehingga rasio belanja modal relative kecil.		
--	--	--	--	--	--	--

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka Pemikiran
Gambar 2.1



Sumber: Data Diolah (2024)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

3.1.1 Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat Daya. Adapun objek dalam penelitian ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat Daya. Dimana dalam penelitian ini membahas tentang kinerja Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat Daya menggunakan beberapa rasio keuangan pilihan.

3.1.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini ialah merupakan penelitian kualitatif (deskriptif), yaitu melakukan perhitungan terhadap data-data keuangan yang dikumpulkan mengumpulkan data dan kemudian menganalisisnya.

3.1.3 Horizon Waktu

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data berdasarkan waktu, yaitu mengumpulkan data dalam periode tahun penelitian yaitu pengamatan tahun 2021-2023.

3.2 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

3.2.1 Sumber Data

1. Data Primer

Yaitu data yang dikumpulkan atau diperoleh secara langsung dari tempat penelitian.

2. Data Sekunder

Merupakan sumber penelitian atau data yang diperoleh melalui pengamatan literature, dokumen-dokumen dari perusahaan dan lain-lainnya.

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan secara langsung dilapangan dengan melakukan beberapa metode:

1. Observasi (pengamatan) adalah suatu teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian yang merupakan sumber data sehingga data yang diperoleh benar-benar bersifat objektif dan sistematis.
2. Dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan mempergunakan data-data yang ada dalam dokumentasi instansi, yakni dengan mengumpulkan data berupa laporan realisasi keuangan tahun 2022 sampai 2023.

3.3 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat induktif atau deskriptif, yaitu analisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Deskriptif memberikan penggambaran terhadap berbagai permasalahan yang menjadi objek

penelitian dan memberikan suatu kesimpulan yang tidak bersifat umum. Hasil penelitian ditekankan pada memberikan gambaran secara objektif tentang keadaan sebenarnya dari obyek yang diteliti. Data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan memudahkan peneliti untuk mencari kembali data yang diperoleh bila diperlukan. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Rasio Efektivitas = $\frac{\text{realisasi pendapatan}}{\text{anggaran pendapatan}} \times 100\%$
2. Rasio Efisiensi = $\frac{\text{realisasi belanja daerah}}{\text{realisasi pendapatan daerah}} \times 100\%$
3. Rasio keserasian

$$\text{Rasio belanja operasi} = \frac{\text{total belanja operasi}}{\text{total belanja daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio belanja modal} = \frac{\text{total belanja modal}}{\text{total belanja daerah}} \times 100\%$$

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Profil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

4.1.1 Sejarah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pada awal kemerdekaan 1945-1950, kementerian pendidikan masih bernama Kementerian Pengajaran masih sangat sederhana. Tapi kesadaran untuk menyiapkan kurikulum sudah dilakukan. Menteri pengajaran yang pertama dalam sejarah Republik Indonesia adalah Ki Hadjar Dewantara. Pada Kabinet Syahrir I, menteri Pengejaran dipercayakan kepada Mr. Mulia, Mr. Mulia melakukan berbagai langkah seperti meneruskan kebijakan menteri sebelumnya di bidang kurikulum berwawasan kebangsaan, memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan, serta menambah jumlah pengajar. Pada Kabinet Syahrir II, Menteri Pengajaran dijabat Muhammad Sjafei samapai tanggal 2 oktober 1946. Selanjut Menteri Pengajaran dipercayakan kepad Mr. Soewandi hingga 27 Juni 1947. Pada era kepemimpinan Mr Soewandi ini terbentuk Panitia Penyelidik Pengajaran Republik Indonesia yang diketuai Ki Hadjar Dewantara, panitia ini bertujuan meletakkan dasar-dasar dan susunan pengajaran baru.

Era Demokrasi Terpimpin 1959-1966. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 mengakhiri era demokrasi parlementer, digantikan era demokrasi terpimpin. Dalam Kabinet Kerj I, 10 Juli 1959- 18 Februari 1960, status kementerian diubah menjadi menteri muda. Kementerian yang mengurus pendidikan dibagi menjadi tiga menteri muda. Menteri Muda Bidang Sosial Kulkuril dipegang Dr. Prijono, Manteri Muda Urusan PP dan K dipegang Sudibjo, dan Menteri Muda Urusan Pengerahan Tenaga Rakyat dipegang Sujono.

Era Orde Baru 1966-1998. Kebijakan di bidang pendidikan di era Orde Baru cukup banyak dan beragam mengingat orde ini memegang kekuasaan cukup lama yaitu 32 tahun. Menteri pendidikan dan kebudayaan di era Orde Baru antara lain Dr. Daud Joesoef, Prof. Dr. Nugroho Notosusanto, Prof. Dr. Faud Hassan, Prof. Dr. Ing. Wardiman Djojonegoro, dan Prof. Dr. Wiranto Aris Munandar.

Era Reformasi 1998-2011. Pada masa ini Departemen Pendidikan dan Kebudayaan diubah menjadi Departemen Pendidikan Nasional dengan menunjukkan Dr. Yahya Muhaimin sebagai Menteri Pendidikan Nasional. Pada tahun 2001 MPR menurunkan Presiden Abdurrahman Wahid dan mengangkat Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden. Di era pemerintahan megawati, Mendiknas dijabat Prof. Drs. A. Malik Fadjar, M.Sc. pada tahun 2004 dan 2009 pemilihan umum secara langsung. Susilo Bambang Yudhoyono berhasil terpilih menjadi Presiden. Selama kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Mendiknas dijabat Prof. Dr. Bambang Sudibyo, MBA. Dan Prof. Dr. Ir. Mohammad Nuh. Pada tahun 2011 istilah departemen diganti menjadi Kementerian dan pada tahun 2012 bidang pendidikan dan kebudayaan disatukan kembali menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Era 2011 sampai sekarang, setelah Menteri Mohammad Nuh, Posisi Mendikbud dijabat oleh Anies Rasyid Baswedan (27 Oktober 2014-27 Juni 2016). Masih di era presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, sejak tanggal 27 Juli 2016 Muhadjir Effendy menggantikan Anies Rasyid Baswedan sebagai Mendikbud. Pada 23 Oktober 2019, Presiden Joko Widodo melantik Nadiem Anwar Makarim sebagai Mendikbud di era Kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Pada tahun

2021, Kementerian Riset dan Teknologi digabungkan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek).

4.1.2 Visi dan Misi

VISI :

“Terwujudnya pelayanan yang professional akuntabilitas dan transparan”

MISI :

1. Melaksanakan pelayanan secara professional
2. Mengkedepankan keterbukaan dalam proses pelayanan
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi serta pelayanan publik berbasis teknologi informasi
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dengan memberikan dukungan maksimal terhadap pendidikan formal dan informal
5. Meningkatkan kreatifitas kepemudaan dan kebijakan yang responsive gender

4.1.3 Tugas dan Fungsi

Tugas :

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat Daya sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang mempunyai tugas umum pemerintahan dibidang perencanaan dan pengendalian mutu pendidikan, tenaga pendidik dan kependidikan, persekolahan dan pendidikan luar sekolah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta membina hubungan kerja dengan seluruh

organisasi perangkat daerah lainnya. Sesuai dengan Qanun Nomor 5 Tahun 2017 tentang Peubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya.

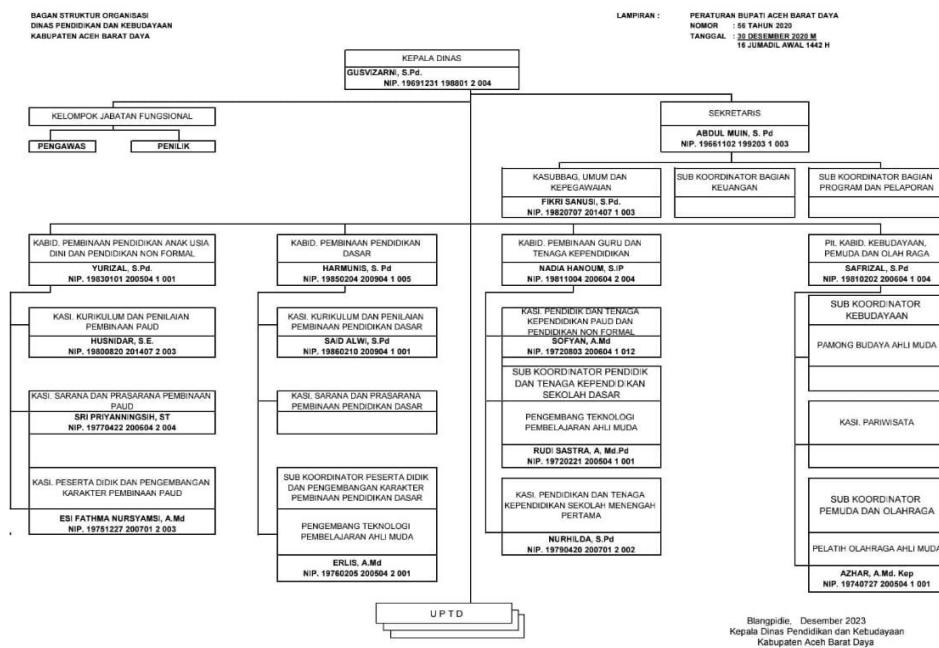
Fungsi :

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dikmaksud poin diatas, Dinas mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pendidikan, yang meliputi Pembinaan pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan luar sekolah
2. Perencanaan meliputi perumusan rencana dan program dibidang pendidikan, yang meliputi pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan luar sekolah
3. Pelaksanaan penetapan kebijakan operasional pendidikan kabupaten sesuai dengan kebijakan nasional dan provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
4. Pembinaan administrasi yang meliputi pembinaan administrasi keuangan dan pelaporan, pembinaan administrasi hukum dan kepegawaian, pembinaan administrasi umum dan perlengkapan
5. Pelaksanaan pengawasan kesiswaan, keuangan, ketalaksanaan, alat-alat perlengkapan, pembangunan gedung sekolah, tenaga teknis dan kurikulum
6. Pelaksana penyediaan sistem informasi manajemen pendidikan kabupaten
7. Penyelenggara dan pembinaan pendidikan serta kerja sama dengan instansi lain dalam mengembangkan seni budaya

8. Pelaksanaan pemberian kajian teknis perijinan dan atau rekomendasi pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah dan satuan /penyelenggara pendidikan nonformal
9. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian serta monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
10. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pemerintah Daerah

Gambar 2.2
Struktur Organisasi



4.2 Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan , maka dapat memperoleh data-data yang diperlukan melalui data yang diambil dari laporan Realisasi Anggaran dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat Daya.

Tabel 2.2

Anggaran dan Realisasi Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat Daya

Tahun	Keterangan	Anggaran	Realisasi	%
2021	Belanja	211,701,457,406	202,809,912,150	95,80
	Belanja Operasi	169,018,321,279	160,752,142,164	95,11
	Belanja Modal	42,683,136,127	42,057,769,986	98,53
2022	Belanja	226.635.140.235,00	218.312.837.056,00	96,03
	Belanja Operasi	180.360.302.120,00	172.885.195.971,00	95,86
	Belanja Modal	46.274.838.115,00	45.427.641.085,00	98,17
2023	Belanja	191.648.909.973	187.878.541.755,00	98,03
	Belanja Operasi	173.267.837.933	169.620.546.676,00	97,99
	Belanja Modal	18.381.072.040	18.257.995.079,00	99,33

Sumber: DISDIKBUD Kabupaten Aceh Barat Daya

Berdasarkan Tabel 2.2 di atas dapat diketahui bahwa jumlah anggaran dan realisasi anggaran belanja pada Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari belanja. operasi, belanja modal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat Daya. Dimana pada tahun 2021 jumlah anggaran Rp. 211,701,457,406 dengan realisasi anggarannya sebesar Rp. 202,809,912,150. Kemudian pada tahun 2022 jumlah anggaran sebesar Rp. 226.635.140.235,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 218.312.837.056,00 dan pada tahun 2023 anggaran sebesar Rp. 191.648.909.973 dengan realisasi anggaran mencapai Rp. 187.878.541.755,00.

4.2.1 Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang telah direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan riil daerah.

Untuk mengetahui seberapa jauh target yang telah dicapai maka perlu dilakukan pengukuran efektivitas dengan rumus yang dapat digunakan ialah:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{realisasi pendapatan}}{\text{anggaran pendapatan}} \times 100\%$$

Standar efektivitas menurut Mohammad Mahsun tentang kriteria penilaian dan kinerja keuangan dapat diketahui efektif atau tidak dengan memenuhi kriteria efektivitasnya sebagai berikut:

Tabel 2.3
Kriteria Tingkat Efektivitas

Rasio Efektivitas %	Kriteria
>100	Sangat Efektif
90-100	Efektif
80-90	Cukup Efektif
60-80	Kurang Efektif
<60	Tidak Efektif

Tabel 2.4
Efektivitas Belanja DISDIKBUD Kabupaten Aceh Barat Daya 2021-2023

Tahun	Anggaran Belanja	Realisasi Anggaran Belanja
2021	211,701,457,406	202,809,912,150
2022	226.635.140.235,00	218.312.837.056,00
2023	191.648.909.973	187.878.541.755,00
Jumlah	629.985.507.612	609.001.290.961

Sumber: Data diolah (2024)

Efektivitas Belanja Tahun 2021

$$\text{Efektivitas Belanja} = \frac{202,809,912,150}{211,701,457,406} \times 100\% = 95,79\%$$

Efektivitas anggaran belanja pada tahun 2021 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat Daya dengan jumlah anggaran Rp. 211,701,457,406 dan realisasi anggaran Rp. 202,809,912,150. Dapat diketahui bahwa rasio efektivitas rata-rata 95,79%. Dalam hal ini menunjukkan rasio efektivitas antara 90%-100% dapat dikatakan efektif. Maka dari itu rasio efektivitas pada tahun 2021 menunjukkan sudah efektif.

Efektivitas Balenja Tahun 2022

$$\text{Efektivitas Belanja} = \frac{218.312.837.056,00}{226.635.140.235,00} \times 100\% = 96,32\%$$

Efektivitas anggaran belanja pada tahun 2022 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat Daya dengan jumlah anggaran Rp. 226.635.140.235,00 dan realisasi anggaran Rp 218.312.837.056,00. Dapat diketahui bahwa rasio efektivitas rata-rata 96,32%. Dalam hal ini menunjukkan rasio efektivitas antara 90%-100% dapat dikatakan efektif. Maka dari itu rasio efektivitas pada tahun 2021 menunjukkan sudah efektif.

Efektivitas Belanja Tahun 2023

$$\text{Efektivitas Belanja} = \frac{187.878.541.755,00}{191.648.909.973} \times 100\% = 98,03\%$$

Efektivitas anggaran belanja pada tahun 2023 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat Daya dengan jumlah anggaran Rp. 191.648.909.973 dan realisasi anggaran Rp. 187.878.541.755,00. Dapat diketahui bahwa rasio efektivitas sebesar 98,03%. Dalam hal ini menunjukkan rasio efektivitas antara 90%-100%

dapat dikatakan efektif. Maka dari itu rasio efektivitas pada tahun 2021 menunjukkan sudah efektif.

4.2.2 Rasio Efisiensi

Efisiensi merupakan suatu pengukuran perbandingan antara realisasi anggaran belanja langsung dengan anggaran belanja. Kinerja anggaran dapat dikatakan efisien apabila semakin sedikit jumlah anggaran yang digunakan dalam mencapai hasil yang direncanakan. Dalam menjalankan tugas pemerintah dikategorikan efisien dengan beberapa nilai hasil rasio, jika rasio efisiensi kurang dari 60% maka dinilai sangat efisien. Jika rasio di atas 100% dinilai tidak efisien. Semakin kecil rasio efisiensi maka kinerja pemerintah semakin baik.

Rasio efisiensi belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Rasio efisiensi dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{realisasi belanja langsung}}{\text{anggaran belanja}} \times 100\%$$

Tabel 2.5
Kriteria Tingkat Efisien

Rasio Efisiensi %	Kriteria
>100	Tidak Efisien
90 – 100	Kurang Efisien
80 – 90	Cukup Efisien
60 – 80	Efisien
< 60	Sangat Efisien

Tabel 2.6

Efisiensi Belanja DISDIKBUD Kabupaten Aceh Barat Daya 2021-2023

Tahun	Anggaran Belanja	Realisasi Anggaran Belanja Langsung
2021	211,701,457,406	198,541,922,950
2022	226.635.140.235,00	204,634,280,525
2023	191.648.909.973	176,198,772,790
Jumlah	629.985.507.612	579,374,976,265

Sumber: Data diolah (2024)

Efisiensi Belanja Tahun 2021

$$\text{Efisiensi Belanja} = \frac{198,541,922,950}{211,701,457,406} \times 100\% = 93,78\%$$

Pada tahun 2021 efisiensi anggaran belanja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat Daya dengan jumlah anggaran Rp. 211,701,457,406, dan realisasi anggaran Rp. 198,541,922,950. Dalam hal ini hasil rasio efisiensi sebesar 93,78%. Rasio efisiensi antara 90-100% dapat dikatakan kurang efisiensi. Oleh karena itu kinerja keuangan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat Daya kurang efisien.

Efisiensi Belanja Tahun 2022

$$\text{Efisiensi Belanja} = \frac{204,634,280,525}{226.635.140.235,00} \times 100\% = 90,29\%$$

Pada tahun 2022 efisiensi anggaran belanja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat Daya dengan jumlah anggaran Rp. 226.635.140.235,00, dan realisasi anggaran Rp. 204,634,280,525. Dalam hal ini hasil rasio efisiensi sebesar 90,29%. Rasio efisiensi antara 80-90% dapat dikatakan cukup efisiensi. Oleh karena itu kinerja keuangan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat Daya cukup efisien.

Efisiensi Belanja Tahun 2023

$$\text{Efisiensi Belanja} = \frac{176,198,772,790}{191.648.909.973} \times 100\% = 91,93\%$$

Pada tahun 2023 efisiensi anggaran belanja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat Daya dengan jumlah anggaran Rp. 191.648.909.973, dan realisasi anggaran Rp. 176,198,772,790. Dalam hal ini hasil rasio efisiensi sebesar 91,93%. Rasio efisiensi antara 90-100% dapat dikatakan kurang efisiensi. Oleh karena itu kinerja keuangan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat Daya kurang efisien.

4.2.3 Rasio Kesperasian

Rasio keserasian adalah menggambarkan bagaimana pemerintah dalam mengalokasikan dana pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. rasio keserasian dapat dihitung dengan rasio belanja operasi dan belanja modal.

Tabel 2.7

Rasio Kesperasian DISDIKBUD Kabupaten Aceh Barat Daya 2021-2023

Tahun	Keterangan	Anggaran	Realisasi	%
2021	Belanja	211,701,457,406	202,809,912,150	95,80
	Belanja Operasi	169,018,321,279	160,752,142,164	95,11
	Belanja Modal	42,683,136,127	42,057,769,986	98,53
2022	Belanja	226.635.140.235,00	218.312.837.056,00	96,03
	Belanja Operasi	180.360.302.120,00	172.885.195.971,00	95,86
	Belanja Modal	46.274.838.115,00	45.427.641.085,00	98,17
2023	Belanja	191.648.909.973	187.878.541.755,00	98,03
	Belanja Operasi	173.267.837.933	169.620.546.676,00	97,99
	Belanja Modal	18.381.072.040	18.257.995.079,00	99,33

Data di olah (2024)

Belanja operasi adalah perbandingan antara total belanja dengan total belanja daerah, rumus untuk menghitung rasio belanja operasi adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{total belanja operasi}}{\text{total belanja daerah}} \times 100\%$$

Belanja Operasi Tahun 2021

$$\text{Belanja Operasi} = \frac{169,018,321,279}{211,701,457,406} \times 100\% = 79,83\%$$

Pada tahun 2021 anggaran belanja operasi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat Daya dengan jumlah anggaran Rp. 169,018,321,279, dan anggaran belanja Rp. 211,701,457,406. Dalam hal ini menunjukkan hasil rasionya sebesar 79,83%.

Belanja Operaai Tahun 2022

$$\text{Belanja Operasi} = \frac{180.360.302.120,00}{226.635.140.235,00} \times 100\% = 79,58\%$$

Pada tahun 2022 anggaran belanja operasi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat Daya dengan jumlah anggaran Rp. 180.360.302.120,00, dan anggaran belanja Rp. 226.635.140.235,00. Dalam hal ini menunjukkan hasil rasionya sebesar 79,58%.

Belanja Operasi Tahun 2023

$$\text{Belanja Operasi} = \frac{173.267.837.933}{191.648.909.973} \times 100\% = 90,40\%$$

Pada tahun 2023 anggaran belanja operasi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat Daya dengan jumlah anggaran Rp. 173.267.837.933, dan realisasi anggaran Rp. 191.648.909.973. Dalam hal ini menunjukkan hasil rasionya sebesar 90,40%.

Rasio belanja modal merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah, rumus untuk menghitung rasio belanja modal adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{total belanja modal}}{\text{total belanja daerah}} \times 100\%$$

Belanja Modal Tahun 2021

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{42.683.136.127}{211.701.457.406} \times 100\% = 20,16\%$$

Pada tahun 2021 anggaran belanja modal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat Daya dengan jumlah anggaran Rp. 42.683.136.127, dan anggaran belanja Rp. 211.701.457.406. Dalam hal ini menunjukkan hasil rasionya sebesar 20,16%.

Belanja Modal Tahun 2022

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{46.274.838.115,00}{226.635.140.235,00} \times 100\% = 20,41\%$$

Pada tahun 2021 anggaran belanja modal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat Daya dengan jumlah anggaran Rp. 46.274.838.115,00, dan anggaran belanja Rp. 226.635.140.235,00. Dalam hal ini menunjukkan hasil rasionya sebesar 20,41%.

Belanja Modal Tahun 2023

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{18.381.072.040}{191.648.909.973} \times 100\% = 9,59\%$$

Pada tahun 2023 anggaran belanja modal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat Daya dengan jumlah anggaran Rp. 18.381.072.040, dan anggaran belanja Rp. 191.648.909.973. Dalam hal ini menunjukkan hasil rasionya sebesar 9,59%.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Analisis Kinerja Keuangan dengan menggunakan Rasio Efektivitas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat Daya

1. Tahun 2021

Pada tahun 2021 rasio efektivitas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat Daya adalah 95,79%. Artinya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat Daya sudah efektif dalam kinerja keuangan dan realisasi anggaran yang direncanakan. Hal ini berarti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat Daya pada tahun 2021 dinilai sudah efektif.

2. Tahun 2022

Pada tahun 2022 rasio efektivitas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat Daya adalah 96,32%.. Artinya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat Daya sudah efektif dalam kinerja keuangan dan realisasi anggaran yang direncanakan. Hal ini berarti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat Daya pada tahun 2022 dinilai sudah efektif.

3. Tahun 2023

Pada tahun 2023 rasio efektivitas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat Daya adalah 98,03%. Artinya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat Daya sudah efektif dalam kinerja keuangan dan realisasi anggaran yang direncanakan. Hal ini berarti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat Daya pada tahun 2023 dinilai sudah efektif.

Berdasarkan dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa rasio efektivitas selama tiga tahun pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat Daya menunjukkan bahwa kinerja keuangan dari tahun 2021 sampai 2023 sudah berjalan efektif.

4.3.2 Analisis Kinerja Keuangan dengan menggunakan Rasio Efisiensi Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat Daya

1. Tahun 2021

Pada Tahun 2021 rasio efisiensi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat Daya 93,78%. Artinya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat Daya dinilai kurang efisien dalam kinerja keuangan dan realisasi anggaran yang direncanakan. Hal ini berarti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat Daya pada tahun 2021 dinilai kurang baik.

2. Tahun 2022

Pada Tahun 2022 rasio efisiensi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat Daya 90,29%. Artinya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat Daya dinilai sudah cukup efisien dalam kinerja keuangan dan realisasi anggaran yang direncanakan. Hal ini berarti

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat Daya pada tahun 2022 dinilai cukup baik.

3. Tahun 2023

Pada Tahun 2023 rasio efisiensi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat Daya 91,93%. Artinya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat Daya dinilai kurang efisien dalam kinerja keuangan dan realisasi anggaran yang direncanakan. Hal ini berarti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat Daya pada tahun 2023 dinilai kurang baik.

Berdasarkan dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa rasio efisiensi selama tiga tahun pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat Daya menunjukkan bahwa kinerja keuangan dari tahun 2021 sampai 2023 berjalan kurang efisien.

4.3.3 Analisis Kinerja Keuangan dengan menggunakan Rasio Keserasian pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat Daya

Berdasarkan pada perhitungan didapatkan hasil perhitungan rasio belanja operasi mengalami peningkatan dari tahun 2021 ke tahun 2023 yaitu masing-masing sebesar 79,83%, 79,58 dan 90,40. Dan belanja rasio belanja modal dari tahun 2021 sampai 2023 masing-masing sebesar 20,16, 20,41 dan 9,59. Pada tahun 2023 mengalami penurunan yang cukup deratis.

Adanya perbedaan nilai yang cukup jauh antara rasio belanja operasi dan rasio belanja modal menunjukkan bahwa dinas pemerintah lebih memprioritaskan alokasi dana pada belanja operasi dibandingkan dengan belanja modal. Untuk rasio keserasian belum ada patokan yang pasti berapa besar nilai rasio belanja operasi maupun belanja modal APBD yang ideal.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah diuraikan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kinerja Keuangan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat Daya dilihat dari rasio efektivitas dari tahun 2021 sampai 2023 berjalan sudah efektif karena efektivitas dari 90-100% dikatakan efektif, yaitu di tahun 2021 sebesar 95,79%, 2021 sebesar 96,32% dan tahun 2023 sebesar 98,03%.
2. Kinerja Keuangan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat Daya dilihat dari rasio efisiensi dari tahun 2021 dan 2023 berjalan kurang efisien. Karena nilai rasionya berkisar antara 90-100%, yaitu di tahun 2021 sebesar 93,78%, dan 2023 sebesar 91,93%. Sedangkan pada tahun 2022 sebesar 90,29% maka bisa dikatakan sudah cukup efisien, karena rasionya antara 80-90% dikatakan cukup efisien.
3. Kinerja Keuangan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat Daya dilihat dari rasio kerasian dari tahun 2021 sampai 2023. Pada tahun 2021 rasio belanja operasi sebesar 79,83%, 2022 sebesar 79,58% dan 2023 sebesar 90,40%. Rasio belanja modal pada tahun 2021 sebesar 20,16%, 2022 sebesar 20,41 dan 2023 sebesar 9,59%. Rasio keserasian pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat Daya memfokuskan pada belanja operasi yang artinya belanja modal yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana cenderung kecil.

5.2 Saran

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menyajikan hasil yang lebih berkualitas, berikut beberapa masukan yang disarankan oleh peneliti bagi instansi terkait dan untuk penelitian selanjutnya:

1. Penelitian selanjutnya diharapkan bisa melakukan penelitian pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat Daya atau menambah Instansi lainnya dan menambah periode waktu penelitian serta menambah jenis-jenis rasio keuangan yang lebih banyak sehingga penelitian selanjutnya lebih akurat dari penelitian ini.
2. Selain menggunakan metode deskriptif penelitian selanjutnya juga bisa menggunakan metode *explanatory* dengan tujuan sampel penelitian yang lebih banyak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat
- Anhiantoko, Hony. 2013. Analisis Kinerja Keuangan Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat. *Economic Bosowa Journal*, Vol 7, No. 003 (2021) Nikita Paotonan.
- Endang, Purwanti & Elien, Noviyanti. 2021. Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2014-2018. *Jurnal Among Makarti*, Vol 14, No. 2.
- Fahmi, Irham. 2018. *Analisis Laporan Keuangan*. Lampulo: ALFABETA.
- Firdaus. 2016. *Analisis Kinerja Keuangan Pada Dinas Perhubungan Informasi dan Informatika Kabupaten Rokan Hulu*. Skripsi. Program Studi Akuntansi.
- Halim, 2012, *Analisi Laporan Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Dan Kemiskinan: Pendekatan Analisis Jalur (Studi Pada Kota Dan Kabupaten Di Sumatera Selatan)*. Skripsi, Universitas Bina Darma.
- Pipit NS, Armalia S, Riki Alfian. 2023. Analisis Laporan Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan PT. Tunas Baru Lampung. *Jurnal Bisnis Darmajaya*, Vol 9, No 1.
- Harahap, Syofyan, Syafri, 2008. *Analisis Krisis atas Laporan Keuangan*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Halim, Abdul, 2001. *Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Pertama. Yogyakarta. UMP AMP YKN
- Harahap, Julaida, Erma. 2021. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas (Studi Kasus di Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2015-2019)*. Skripsi. Akuntansi Syariah
- Ismail, a., & Irwan, A. 2021. *Dampak Pandemi Covid-19 Pada Manajemen Pendidikan Tinggi*. Nas Media Pustaka.
- Kasmir, 2012, *Analisis Laporan Keuangan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Munawir, S. 2012. *Analisis Informasi Keuangan*, Leberly, Yogyakarta
- Mardiasmo. 2018. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.

- Mahmudi. 2017. *Akuntansi Sektor Publik*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: UII
- Mahsun, Mohammad. 2014. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE
- S. Munawir. 1990. *Analisa Kinerja Keuangan Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bone*. Skripsi, Universitas Bosowa
- Suharto P. dkk. 2022. Analisis Kinerja Keuangan Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Rawas Utara. *Jurnal Kajian Akuntansi dan Auditing*, Vol 17, No 1.
- Oktaviani, E. 2020. Analisis Biaya Operasional Terhadap Profitabilitas Pada PT. Jalan Tol Seksi Empat. *Economics Bosowa*, 5(002), 98-107.
- Sri Septiana, 2019. *Analisis Kinerja Keuangan Pada Dinas Pendidikan Perhubungan Kota Batam*. Skripsi Universitas Kota Batam
- SAK, 2015. *Analisis Laporan Keuangan*. Penerbit: Pustaka Baru Press.
- Yadiati. Winwin. 2007. *Teori Akuntansi*. Jakarta. Kencana